

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN di prakarsai oleh lima negara pendiri yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai hari ASEAN. ASEAN pada awalnya dibentuk atas dasar kerja sama politik untuk menjaga keamanan dan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Kemudian, seiring berjalannya waktu lima negara lain bergabung diantaranya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999). Kerjasama regional ini semakin di perkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai (Kemenlu, 2011).

Diawali dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-dua pada 15 Desember, 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia KTT ASEAN menyepakati visi ASEAN 2020, yakni Komunitas ASEAN akan berkonsentrasi pada: Pertama, menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan

investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Kedua, mempercepat liberalisasi perdagangan dibidang jasa. Ketiga, meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Kemudian KTT ASEAN ke-6 dan ke-7 juga membahas berbagai hal yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut (Bustami, 2013).

Perkembangan dan Cita-cita integrasi ASEAN saat ini lebih jelas setelah para kepala negara menetapkan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang tercantum dalam Bali *Concord II* yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Dalam perjalanannya, MEA adalah tujuan akhir dari keinginan berintegrasi di Asia Tenggara (Dhenny.H dan Pazli, 2013).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) *blue print* merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan MEA. MEA *blue print* menghasilkan empat pilar utama yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi tunggal yang didukung dengan kebebasan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal. (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*. (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta integrasi ASEAN untuk negara KMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam). (4) ASEAN sebagai kawasan terintegrasi penuh oleh perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan (Bustami, 2013).

Terinspirasi dari keberhasilan *European Union* (UE) serta kebangkitan ekonomi China dan India, maka ASEAN melakukan integrasi ekonomi. Pencapaian dilakukan melalui lima pilar, yaitu: aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Berbagai kerjasama ekonomi dilakukan khususnya dibidang perdagangan dan investasi, dimulai dari *Preferential Trade Arrangement* (PTA, 1977), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA, 1992), *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS, 1995), *ASEAN Investment Area* (AIA, 1998) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Bustami, 2013).

Visi ASEAN awalnya dicanangkan pada tahun 2020. Namun, dipercepat menjadi 2015 hal ini tertuang dalam *Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007 untuk mempercepat integrasi di ASEAN. Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah suatu kesepakatan tentang pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*). Ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan (Arifin, 2008).

Dalam rangka merealisasikan pilar *ASEAN Community* melalui tiga pilar diantaranya: Pilar Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah semakin bebasnya aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil pada tahun 2015. Langkah ini telah dipertimbangkan oleh perwakilan-perwakilan

ASEAN yang ingin memaksimalkan potensi yang ada di Asia Tenggara sehingga dibutuhkan kemudahan akses *intra-ASEAN* sehingga transaksi di kawasan ini dapat meningkat (Arifin, 2008).

Pilar kedua, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah bidang keamanan (*ASEAN Security Community*). Di bidang Keamanan, negara-negara anggota saling bekerja sama untuk menjaga keamanan kawasan dari ancaman negara di luar ASEAN atau dari dalam ASEAN yang mengancam keamanan kawasan. Dengan meningkatkan keamanan diharapkan dapat juga meningkatkan kemajuan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak pada kemajuan kawasan (Arifin, 2008).

Pilar ketiga, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*) adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-cultural Community*). *Roadmap ASEAN Socio-cultural Community* terkandung enam program kerja yang harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; pembangunan manusia, kesejahteraan sosial dan perlindungan, keadilan sosial dan hak-hak, memastikan kelestarian lingkungan, mempersempit kesenjangan pengembangan dan membangun identitas ASEAN (Arifin,2008).

Tiga pilar yang disepakati negara anggota ASEAN dalam kerangka *ASEAN Community*, yakni pilar ekonomi, keamanan dan sosial budaya, ketiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa serta investasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dimensi keamanan yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi tersebut.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA pada 2015, Negara-negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa “*free trade area*” (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan

antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat bangsa ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sumber daya Manusia dari negara-negara anggota MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Dengan demikian, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN.

Indonesia merupakan negara berkembang namun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5% pada tahun 2012 di atas beberapa negara maju. Peran dari SDM menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kesiapan SDM Indonesia yang masih kurang seperti tingkat pendidikan dan kurangnya kualitas dari sarjana-sarjana Indonesia. Hal ini, dapat menjadi penyebab terhambatnya peluang Indonesia dalam menghadapi MEA. Kementerian UKM dan Koperasi merilis tahun 2012 setidaknya ada 493.000 sarjana lulusan perguruan tinggi yang menganggur (Yarist Firdaus, 2013).

Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengusaha-pengusaha Indonesia agar mampu menjadi pemain pada MEA. Sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai MEA agar pengusaha-pengusaha Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif. Pemenuhan SDM (pengusaha) yang berkualitas dan unggul akan berpengaruh pada kemajuan perekonomian Indonesia di masa depan. Apabila sasaran di atas bisa terpenuhi, Indonesia akan bergerak menuju negara maju dan sejahtera di masa yang akan datang.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku pada akhir tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus ikut mempersiapkan segalanya, karena yang terpenting adalah bagaimana negara Indonesia bisa siap bersaing atau tidak dengan negara ASEAN lainnya. Peran dari pemerintah mengenai kebijakan yang di ambil untuk mendukung pengusaha lokal sangat penting untuk menghadapi MEA 2015.

Saat pemberlakuan MEA 2015, pengusaha-pengusaha Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penonton. Upaya pemerintah dan swasta harus mendorong pengusaha Indonesia untuk mampu meningkatkan kompetensi dengan mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, terutama pengusaha-pengusaha lokal harus siap menghadapi tantangan global yakni bersaing dengan pengusaha-pengusaha se-ASEAN.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung merupakan salah satu organisasi perkumpulan dan wadah bagi pengusaha-pengusaha di Lampung akan terkena dampak positif maupun negatif dari penerapan MEA 2015. Oleh karena itu, Sosialisasi mengenai MEA di Lampung sangat penting dilakukan lebih intensif agar membantu menambah wawasan pengusaha. sosialisasi dapat dilakukan melalui media, seminar, diskusi dan forum yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pihak lainnya.

B. Permasalahan

Menurut Gaspersz 2014, Kondisi perekonomian Indonesia tidak berada dalam posisi yang menguntungkan dalam menyongsong MEA. kemajuan suatu negara akan sangat ditentukan oleh produktivitas modal dan produktivitas tenaga kerja di negara itu. Berdasarkan prinsip keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, maka Negara pengekspor akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada Negara-negara pengimpor, sehingga barang-barang akan mengalir dari Negara-negara berproduktivitas tinggi ke Negara-negara berproduktivitas rendah. Hal ini terjadi di Indonesia sekarang ini, di mana ketergantungan pada impor telah semakin tinggi dan menghasilkan defisit transaksi berjalan yang semakin besar, sehingga berakibat nilai tukar rupiah menjadi semakin lemah.

Tindakan yang harus dilakukan Indonesia ketika memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah perbaikan serius berkaitan dengan indikator-indikator yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Terdapat sepuluh indikator kinerja dan melakukan perbandingan di antara Negara-negara ASEAN. Pada saat ini Posisi Indonesia telah kalah daripada Vietnam, dan Filipina serta hampir sama dengan Kamboja. Dalam beberapa hal, Kamboja lebih unggul dari Indonesia, yaitu: upah buruh rendah, suku bunga rendah, dan *corporate tax* yang rendah (lihat tabel 1).

Tabel 1. Analisis posisi daya saing negara-negara ASEAN memasuki MEA 2015

No	Indikator kinerja	Rangking posisi daya saing negara-negara ASEAN (1=terbaik-10=terburuk)									
		Singapura	Brunei	Thailand	Malaysia	Vietnam	Filipina	Indonesia	Kamboja	Laos	Myanmar
1	Indeks daya saing global, 2013	1	3	4	2	7	6	5	9	8	10
2	Indeks kinerja Logistik, 2014	1	n.a	3	2	4	6	5	7	8	9
3	Indeks Inovasi Global, 2013	1	4	3	2	5	7	6	8	n.a	n.a
4	Indeks Kemudahan Bisnis, 2014	1	4	3	2	5	6	7	8	9	10
5	Indeks Worldwide Governance Indicator ave, 2012	1	2	4	3	5	6	7	8	10	9
6	Indeks persepsi korupsi	1	2	5	3	7	4	6	10	8	9
7	corporate tax, 2014	1	5	2	8	5	10	8	2	7	2
8	produktivitas tenaga kerja, 2012	2	1	4	3	7	6	5	9	8	10
9	suku bunga, 2014	1	7	3	4	8	5	9	2	6	10
10	upah minimum tenaga kerja, 2013	1	n.a	5	2	6	4	3	9	8	7
Skor total 10 Indikator		11	28	36	32	59	60	61	72	72	76
rangking posisi daya saing		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sumber : Gaspersz, 2014 (dok. Pribadi) diolah dari berbagai laporan (sumber)

Kesepuluh indikator kinerja itu meliputi: (1) indeks daya saing global (*global competitiveness index*), (2) indeks kinerja logistik (*overall logistic performance index*), (3) indeks inovasi global (*global innovation index*), (4) indeks kemudahan berbisnis (*ease of doing business index*), (5) indeks *worldwide governance indicators average (WGIA index)*, (6) indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) (7) tarif pajak yang berlaku (*corporate tax rate*), (8) produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*), (9) suku bunga yang berlaku (*interest rate*), dan (10) besaran upah minimum (*legal minimum labor wage*).

Pertama, indeks daya saing global, yang diukur berdasarkan 12 indikator utama, yaitu: (1) institusi pemerintah dan swasta, (2) infrastruktur, (3) kestabilan ekonomi makro, (4) pendidikan dasar dan kesehatan, (5) pendidikan tinggi dan pelatihan, (6) efisiensi pasar barang, (7) efisiensi pasar tenaga kerja, (8) perkembangan pasar uang, (9) kemampuan memanfaatkan teknologi yang ada, (10) ukuran pasar domestik dan internasional, (11) kecanggihan proses produksi barang-barang baru, dan (12) inovasi. *World Economic Forum* dalam Laporan *The Global Competitiveness Report* tahun 2013-2014, menempatkan Indonesia di peringkat ke-38 dari 148 negara dan merupakan peringkat ke-5 di antara Negara-negara ASEAN. Peringkat dari Negara-negara ASEAN: (1) Singapura (peringkat 2 dari 148 negara), (2) Malaysia (24), (3) Brunei Darussalam (26), (4) Thailand (37), (5) Indonesia (38), (6) Filipina (59), (7) Vietnam (70), (8) Laos (81), (9) Kamboja (88), dan (10) Myanmar (139).

Kedua, indeks kinerja logistik secara keseluruhan yang diukur berdasarkan 6 (enam) indikator, yaitu: (1) bea cukai, (2) infrastruktur, (3) pengapalan internasional (*international shipment*), (4) kualitas dan kompetensi logistik, (5) pelacakan dan pencatatan (*tracking and tracing*), dan (6) ketepatan waktu (*timeliness*). World Bank dalam Laporan *The Logistics Performance Index and Its Indicators* tahun 2014 memosisikan Indonesia di urutan ke-53 dari 163 negara dan merupakan peringkat ke-5 di antara Negara-negara ASEAN. Peringkat dari Negara-negara ASEAN: (1) Singapura (peringkat 5 dari 163 negara), (2) Malaysia (25), (3) Thailand (35), (4) Vietnam (48), (5) Indonesia (53), (6) Filipina (57), (7) Kamboja (83), (8) Laos (131), dan (9) Myanmar (145). Catatan: Brunei Darussalam tidak diukur.

Ketiga, indeks inovasi global yang diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator berikut: (1) lembaga, (2) sumber daya manusia dan penelitian, (3) infrastruktur, (4) kecanggihan pasar, (5) kecanggihan bisnis, (6) output pengetahuan dan teknologi, dan (7) output kreatif. Masing-masing indikator terdiri dari beberapa variabel yang secara total terdapat 84 variabel individual. Skor Inovasi berkisar dari 0 (terendah) sampai 100 (tertinggi). Berdasarkan Indeks Inovasi Global 2013 diketahui bahwa Indonesia berada pada urutan ke-85 dari 142 negara di dunia. Peringkat dari Negara-negara ASEAN: (1) Singapura (peringkat 8 dari 142 negara, Skor: 59,41), (2) Malaysia (Peringkat 32, Skor: 46,92), (3) Thailand (57; Skor: 37,63), (4) Brunei Darussalam (74; Skor: 35,53), (5) Vietnam (76; Skor: 34,82), (6) Indonesia (85; Skor: 31,92), (7) Filipina (90;

Skor: 31,18), dan (8) Kamboja (110; Skor: 28,07). Catatan: Laos dan Myanmar tidak diukur.

Keempat, indeks kemudahan berbisnis, yang disusun berdasarkan 10 indikator utama, yaitu (1) kemudahan memulai bisnis, (2) kemudahan memperoleh ijin konstruksi, (3) ketersediaan listrik, (4) kemudahan mendaftarkan property, (5) kemudahan memperoleh kredit, (6) perlindungan kepada investor, (7) pembayaran pajak, (8) perdagangan lintas batas, (9) penghargaan terhadap kontrak, dan (10) resolusi jika terjadi kebangkrutan. Berdasarkan Laporan Indeks Kemudahan Melakukan Bisnis, 2014, posisi Indonesia menempati urutan ke-120 dari 189 negara di dunia. Di antara Negara-negara ASEAN, Indonesia berada di urutan ke-7, yaitu: (1) Singapura (peringkat 1 dari 189 negara), (2) Malaysia (Peringkat 6), (3) Thailand (18), (4) Brunei Darussalam (59), (5) Vietnam (99), (6) Filipina (108), (7) Indonesia (120), (8) Kamboja (137), (9) Laos (159), dan (10) Myanmar (182).

Kelima, indeks *worldwide governance indicator average*, yang disusun berdasarkan 6 (enam) indikator kunci, yaitu: (1) demokrasi dan akuntabilitas, (2) kestabilan politik dan ketiadaan kekerasan, (3) efektivitas pemerintahan, (4) kualitas peraturan, (5) penegakan hukum, dan (6) Pengendalian korupsi. Bank Dunia menyusun WGIA yang menghasilkan angka indeks dari minus 2,5 (terburuk) sampai positif 2,5 (terbaik). Pada tahun 2012 Indonesia berada di posisi ke-7 di antara Negara-negara ASEAN, yaitu: (1) Singapura (Skor 2,15), (2) Brunei Darussalam (0,64), (3) Malaysia (0,30), (4) Thailand (-0,34), (5)

Vietnam (-0,56), (6) Filipina (-0,58), (7) Indonesia (-0,66), (8) Kamboja (-1,04), (9) Myanmar (-1,12), dan (10) Laos (-1,40).

Keenam, indeks persepsi korupsi, yang berskala dari 0 (terburuk) sampai 100 (terbaik). Berdasarkan Laporan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2013, Posisi Indonesia berada pada urutan ke-114 dari 175 negara. Posisi Indonesia berada pada urutan ke di antara Negara-negara ASEAN, yaitu: (1) Singapura (peringkat 5 dari 175 negara; Skor: 86), (2) Brunei Darussalam (peringkat 38; Skor: 60), (3) Malaysia (53; Skor: 50), (4) Filipina (94; Skor: 36), (5) Thailand (102; Skor: 35), (6) Indonesia (114; Skor: 32), (7) Vietnam (116; Skor: 31), (8) Laos (140; Skor: 26), (9) Myanmar (157; Skor: 21), dan (10) Kamboja (160; Skor: 20).

Ketujuh, berkaitan dengan *corporate tax* atau PPh badan yang ditawarkan pemerintah Indonesia juga masih kalah menarik dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Sejauh ini pemerintah masih mematok tarif PPh badan sebesar 25 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif *corporate tax* yang dipatok pemerintah Singapura sebesar 17 persen, ataupun Thailand, Myanmar, dan Kamboja masing-masing 20 persen. Jika diurutkan dari pajak termurah posisi Indonesia berada di posisi ke-8 dibanding negara-negara ASEAN lainnya, yakni diurutkan berdasarkan pajak paling murah: (1) Singapura (17%), (2) Thailand, Kamboja, dan Myanmar (20%), (5) Brunei Darussalam dan Vietnam (22%), (7) Laos (24%), (8) Indonesia dan Malaysia (25%), dan (10) Filipina (30%).

Kedelapan, berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, yang diukur berdasarkan PDB (produk domestik bruto) per tenaga kerja, maka Indonesia berada di urutan ke-5 di antara Negara-negara ASEAN. Di mana posisi pertama diraih oleh Brunei Darussalam dengan PDB per tenaga kerja sebesar US\$ 92.300, (2) Singapura (US\$92.000/tenaga kerja), (3) Malaysia (US\$ 33.300/tenaga kerja), (4) Thailand (USD\$ 15.400/tenaga kerja), (5) Indonesia (US\$ 9.500/tenaga kerja), (6) Filipina (US\$ 9.200/tenaga kerja), (7) Vietnam (US\$ 5.500/tenaga kerja), (8) Laos (US\$ 5.000/tenaga kerja), (9) Kamboja (US\$ 3.600/tenaga kerja), dan (10) Myanmar (US\$ 3.400/tenaga kerja).

Kesembilan, berkaitan dengan suku bunga (*interest rate*) yang berlaku, ternyata suku bunga yang dipatok 7,5% per tahun oleh Bank Indonesia sekarang ini (2014) masih jauh lebih tinggi dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya. Dari kriteria suku bunga, Indonesia berada di posisi ke-9 di antara Negara-negara ASEAN, yaitu: (1) Singapura (0,21%), (2) Kamboja (1,42%), (3) Thailand (2,00%), (4) Malaysia (3,00%), (5) Filipina (3,50%), (6) Laos (5,00%), (7) Brunei Darussalam (5,50%), (8) Vietnam (6,50%), (9) Indonesia (7,50%), dan (10) Myanmar (10,00%). Catatan: suku bunga pinjaman komersial sekarang di Indonesia telah mencapai 16% per tahun.

Kesepuluh, berkaitan dengan besaran upah minimum, ternyata upah minimum di Indonesia termasuk yang tinggi di ASEAN. berdasarkan hasil survei JETRO (Japan External Trade Organization) pada 2013, besaran upah minimum di Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terbesar ketiga di ASEAN, dengan

angka rata-rata US\$ 226 per pekerja per bulan. Posisi upah minimum terendah sampai tertinggi, adalah: (1) Singapura (USD \$406/Bulan), Malaysia (USD \$300/bulan), (3) Indonesia (USD \$226/bulan), (4) Filipina (USD \$200/bulan), (5) Thailand (USD\$197/bulan), (6) Vietnam (USD \$113/bulan), (7) Myanmar (USD \$112/bulan), (8) Laos (USD \$78/bulan), dan (1) Kamboja (USD\$64/bulan). Catatan: Brunei Darussalam tidak menetapkan upah minimum. Meskipun upah minimum tenaga kerja di Indonesia tergolong tinggi (posisi nomor 3 tertinggi di ASEAN), namun besaran upah minimum yang berlaku di Indonesia itu ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang berada di urutan ke-5 dari Negara-negara ASEAN.

Langkah berikut yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan berdasarkan 10 indikator di atas. Indonesia harus berani menghadapi kenyataan dan mengakui fakta bahwa Indonesia memang telah tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Hanya Tindakan Nyata yang membawa perubahan atau perbaikan, bukan asal berbicara atau berdiskusi saja. Jika tidak ada perbaikan signifikan, maka Indonesia harus siap menerima kenyataan bahwa produk-produk dan orang-orang dari Negara-negara lain di ASEAN akan memasuki pasar Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri pada tahun akhir desember 2015 mendatang.

Jika dilihat dari neraca perdagangan esport impor Indonesia di intra ASEAN Indonesia lebih banyak melakukan impor daripada ekspor ke negara seperti

Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan masih surplus ekspor impor ke negara seperti Laos, Kambodja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Namun, yang harus menjadi catatan Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah dan rempah-rempah sedangkan mengekspor barang jadi (lihat tabel 2).

Tabel 2. Neraca Perdagangan ekspor impor Indonesia dengan negara intra-ASEAN 2004-2008

Negara	2004	2005	2006	2007	2008
Brunei	-263,48	-1.158,17	-1.569,35	-1.821,35	-2.356,95
Kambodja	70,72	93,2	102,59	120,6	172,02
Laos	1,57	1,69	4,18	0,77	3,78
Filipina	1.009,02	1.096,89	1.121,02	1.493,83	1.298,07
Malaysia	1.334,10	1.282,77	917,42	-1.315,86	-2.489,74
Myanmar	42,86	63,84	118,04	231,99	221,08
Singapura	-8487	-1.635,33	-1.104,68	661,82	-8.927,44
Thailand	-795,35	-1.200,50	-281,93	-1.232,79	-2.673,01
Vietnam	185,19	239,42	205,2	360,96	955,24
Total	1.499,76	-1.216,19	-487,53	-1.500,02	-13.796,94

Sumber : (Bustami, 2013)

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada posisi menengah yakni posisi ke 5 (lima) dari sepuluh Negara ASEAN. IPM Indonesia sebesar 0,684 masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kemudian, berada diatas Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar (tabel 2).

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ASEAN, 2013

No	Negara	Skor IPM	Peringkat Dunia	Kelompok
1	Singapura	0,901	9	Very High
2	Brunai Darussalam	0,852	30	Very High
3	Malaysia	0,773	62	High
4	Thailand	0,722	89	High
5	Indonesia	0,684	108	Medium
6	Filipina	0,660	118	Medium
7	Vietnam	0,638	121	Medium
8	Kamboja	0,584	128	Medium
9	Laos	0,569	136	Medium
10	Myanmar	0,524	150	Low

Sumber : (UNDP, 2014)

C. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan penelitian yang telah dijabarkan di atas maka, peneliti tertarik mengkaji tentang kesiapan pengusaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dengan demikian penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan Pengusaha tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?
2. Bagaimana sikap pengusaha terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?
3. Bagaimana Tindakan pengusaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?

4. Bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengusaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sehingga, harapan kita agar pengusaha-pengusaha Lokal mampu menjadi pemain di MEA 2015, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pengetahuan Pengusaha tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
2. Mengetahui sikap pengusaha terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
3. Mengetahui Tindakan pengusaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
4. Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap tindakan pengusaha dalam menghadapi MEA 2015.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dikaji dari pandangan sosiologis, terutama tentang penerapan MEA tahun 2015 yang berdampak di Lampung.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mampu menjelaskan kondisi kesiapan pengusaha Lokal menghadapi pasar global.